

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai analisis manajemen penanggulangan *stunting* oleh pemerintah desa di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.:

1. Analisis manajemen penanggulangan *stunting* oleh pemerintah desa di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan teori George R. Terry tentang fungsi manajemen, termasuk perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Setiap fungsi manajemen telah dilaksanakan, namun beberapa indikator masih terkendala.
  - a. Perencanaan (*planning*)

Tahapan perencanaan efektif yang dilakukan oleh Kepala Desa Banfanu dalam penanggulangan *stunting* berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sasaran ini kemudian dijabarkan secara efektif oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara. Melihat target RPJMD Tahun 2022 masih terdapat kesenjangan. Target

prevelensi *stunting* dalam RPJMD Tahun 2022 adalah 23% atau ada kesenjangan sebanyak 0,6%. Mengingat hal tersebut, diperlukan pendekatan yang masif atau pembuatan program-program percepatan penurunan *stunting* yang efektif, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yakni 18% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024 (sesuai target Nasional). Dalam periode 2020 – 2023, program baru yang efektif diterapkan yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dilakukan selama 90 hari (3 bulan), dengan target sasaran yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita dan anak PAUD

Pelaksanaan perencanaan program ini juga didasarkan pada lima pilar strategi yang efektif, yaitu: 1) komitmen dan visi kepemimpinan; 2) kampanye dan komunikasi perubahan di tingkat nasional; 3) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program desa; 4) gizi dan ketahanan pangan; dan 5) pemantauan dan evaluasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam tahapan pilar keempat (4) Kepala Desa dan Pihak Puskesmas tidak dapat menjamin hal ini terpenuhi secara keseluruhan berkaitan dengan pemenuhan pangan dan gizi dan penguatan fortifikasi makanan. Hasil temuan lapangan yang didukung dengan Rekap Data Status Gizi Kecamatan Noemuti Berdasarkan Berat Badan Tinggi Badan (BB/TB) Bulan Februari Tahun 2023 Desa Banfanu masih menduduki angka tertinggi kasus *stunting*. Inilah yang bmenjadi fokus Kepala Desa Banfanu dan melibatkan setiap

lintas sektor bahkan kesadaran setiap orang tua yang memiliki anak berisiko atau keluarga untuk menekan angka *stunting*.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahapan pengorganisasian dalam penanggulangan *stunting* oleh pemerintah Desa di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, diserasikan berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara. Di desa Banfanu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari tiga orang: bidan, kader PKK Pokja 4 dan kader KB. Tugas dan fungsi TPK adalah mendampingi ibu calon pengantin (catin), pasangan suami istri (PUS), ibu hamil, melahirkan selama masa nifas, mempunyai anak, dan akhirnya anak (baduta). Pelaksanaan koordinasi Kepala Desa Banfanu dilakukan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat Puskesmas Noemuti, Camat setempat, Polsek setempat, Kantor BKKBN, Dinas Kesehatan, hingga LSM yang membantu pengembangan SDM dan pengetahuan kader dan masyarakat.

Kader yang ada di Desa Banfanu dipilih berdasarkan hasil musyawarah di Desa dengan tujuan dapat melihat kader yang akan mengambil peran dalam penurunan *stunting* memiliki pemahaman mengenai *stunting* dan yang paling penting bisa membangun

komunikasi yang baik untuk menjalin kerjasama. Para kader mengalami kendala dalam mencari sasaran masyarakat salahsatu yang dirasakan petugas yaitu berkaitan dengan transportasi (tidak memiliki kendaraan). Jika petugas menjalankan tugas dengan jalan kaki, maka jarak yang harus ditempuh sekitar 7 Km- 10 Km. Dampak yang terjadi akibat kendala ini yaitu bantuan seperti PMT akan mubazir. Kendala selanjutnya yang dirasakan yaitu terdapat beberapa Kepala Desa yang belum memahami apa itu Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).

c. Pengarahan (*Actuating*)

Tahapan pengarahan Kepala Desa Banfanu dalam penanggulangan kasus *stunting* dilakukan dengan melibatkan pihak Puskesmas berkaitan dengan pelatihan atau pembinaan kader, terutama tim desa yang sudah terbentuk. Para kader yang dianggap sebagai tim pendamping sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana mensosialisasi dan mempraktikkan langsung kepada keluarga sasaran di lapangan. Puskesmas Noemuti juga mengatur pelatihan dan pembinaan ini, yang biasanya diadakan di aula puskesmas. Setiap bulan, LSM *Safe The Children* mengadakan pengarahan dengan tema yang berbeda. Pengarahan ini juga menggunakan modul yang membahas masalah seperti sesi asi eksklusif, semilan sembarangan, dan rencana makan untuk bayi dan anak. Sejak tahun 2021 hingga

2023, LSM *Save The Children* bergabung dan bekerja sama dengan Desa Banfanu dengan jadwal yang dilaksanakan setiap bulan. *Save the Children* bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bertekad mengatasi *stunting* salahsatunya adalah dengan peningkatana sumber daya manusia, yaitu melalui pelatihan para kader posyandu dan Keder Pengembangan Manusia. Salasatunya penyelenggaraan ssosialisasi yang berjudul “Refresh Emo Demo (*Emotional Demonstration*) Bagi Kader dan Kader Perkembangan Manusia (KPM)” yang dilakukan pada bulan Maret dengan melibatkan kurang lebih 120 orang dari 20 Desa yang tersebar pada 6 puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader memahami modul baru berkaitan dengan konseling kelompok yang akan dilakukan pada posyandu masing-masing dengan tujuan ada peningkatan kapasitas, pengetahuan pada pola perilaku masyarakat.

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021, keberhasilan penanganan *stunting* dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021–2024 dapat diukur secara efektif dengan menilai seberapa baik kegiatan dilakukan menggunakan sejumlah poin yang berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan berupa evaluasi dilakukan setiap bulan

setelah penimbangan yang dilakukan di posyandu desa. Didukung dengan jawaban narasumber Kader *Stunting* menyampaikan di Desa Banfanu bahwasannya evaluasi pengawasan penanganan *stunting* dilakukan pada saat rapat internal dengan melibatkan bidang Kepala Desa dan bidan desa. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada Desa Banfanu, tetapi juga dari tingkat Kabupaten, sampai ke Desa. Pengawasan ini terdiri dari pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masing-masing dinas yang memiliki dana yang berkaitan dengan program. Pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat dengan dengan waktu setahun dua (2) kali yang dilaksanakan pada bulan Juni-September. Setelah standar pelaksanaan selesai, tahap pengawasan berikutnya adalah melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dii Desa Banfanu, program penanggulangan *stunting* dijalankan secara efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Dalam proses manajemen penanggulangan *stunting* oleh pemerintah desa di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi. Faktor penghambat dalam penanggulangan *stunting* di Desa Banfanu disebabkan oleh pola perilaku dan pola asu gaya hidup keluarga. Temuan di lapangan menunjukkan mengenai asupan yang berkaitan dengan pola makan bayi di Desa Banfanu adalah pada waktu jam makan pagi, siang, dan malam. Beberapa orang tua

yang memiliki pemahaman akan hal ini namun hal tersebut disepelihkan dengan alasan yang tidak jelas. Pola jam makan bayi ini menjadi fokus pemerintah, yaitu dengan memberlakukan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kendala yang ditemukan disini yaitu masyarakat yang kurang responsive terkhususnya masyarakat penerima manfaat hal ini tidak bisa dijangkau seluruhnya oleh para kader jika petugas menjalankan tugas dengan jalan kaki (tidak memiliki transportasi), maka jarak yang harus ditempuh sekitar 7 Km- 10 Km. Dampak yang terjadi akibat kendala ini yaitu bantuan seperti PMT akan mubazir. Temuan yang diperkuat dengan observasi sosialisasi yang dilakukan ibu PKK yang melibatkan para kader perwakilan kelompok kerja menyampaikan sumber utama munculnya *stunting* berawal dari dalam keluarga. Faktor penghambat akibatnya yaitu 1) kultur yang masih bersifat tradisional 2) pola pikir mengenai kultur yang harus mendahulukan setiap laki-laki dibandingkn perempuan 3) keterbatasan orang tua memiliki pengetahuan mengenai informasi gizi melalui penggunaan internet atau media sosial. 4) pengobatan berbayar juga berpengaruh pada pola pikir masyarakat untuk memeriksa kesehatan. 5) informasi mengenai penyuluhan yang tidak merata menyebabkan perwakilan dari setiap desa sering terlambat hadir dan kurang menyimak informasi yang disampaikan, bahkan banyak peserta yang tidak hadir. Faktor lainnya yang ditemukan yaitu kurangnya keterpaduan seperti

contoh pihak Puskesmas menerapkan indikator Keluarga Sehat (KS) sedangkan dari Kantor BKKBN memiliki standar tersendiri dari kementrian. Faktor penghabat manajemen penanggulangan *stunting* yang ditemukan yaitu berkaitan dengan salah pemanfaatan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

#### 4.2 Saran

- 1) Agar upaya penanggulangan *stunting* yang dilakukan Kepala Desa dapat berjalan dengan optimal maka perlu peningkatan keterpaduan antar lintas sektor baik dalam keserasian penentuan standar indikator perencanaan program atau indeks yang dipakai serentak satu pintu.
- 2) Agar upaya penanggulangan *stunting* di Desa Banfanu mampu menjangkau seluruh masyarakat maka penting bagi pemerintah desa untuk menerapkan metode yang lebih kreatif atau menarik sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala desa lebih memanfaatkan teknologi, seminar, berita, sosial media yang terhubung dengan seluruh masyarakat desa, perangkat desa, kader, bidan desa, dan puskesmas dalam penanggulangan *stunting*.
- 3) Agar tidak terjadi ketidaktahuan informasi mengenai *stunting* perlu melakukan survei secara berkala oleh Kepala Desa kepada kader kelompok kerja (POKJA) setiap perwakilan desa.
- 4) Agar koordinasi yang dijalankan dapat berjalan mencapai tujuan penurunan kasus *stunting* perlu adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan *stunting* dengan melakukan



penyadaran yang lebih massif, meningkatnya literasi *stunting* terkhususnya orang tua di Desa Banfanu agar mempermudah dan menambah wawasan masyarakat dalam hal apapun baik itu mengenai *stunting* dan lainnya.